

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Badrudin (2017:100) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Tujuannya untuk mengupayakan keleluasaan pendanaan perwujudan asas desentralisasi”. Canuria (2017:119) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diterima dari sumber-sumber didalam wilayahnya sendiri, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, maka semakin besar juga kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi daerahnya”.

Dari beberapa pengertian di atas mengenai PAD dapat dinyatakan bahwa PAD merupakan penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri, seperti hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku. Pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari empat(4) sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu : Pajak Daerah, Retrubusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

a. Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak menerima kompensasi langsung, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Pajak untuk Provinsi yang terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Kendaraan di Air
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Air Permukaan
- f. Pajak Rokok

2. Pajak untuk Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c
- g. Pajak Lingkungan

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan memberikan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum meliputi, Retribusi Jasa Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penggantian Biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Kapal, Retribusi Biaya Penganyian Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan berlandas asas komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa meliputi, Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Penyedotan WC, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Parkir Khusus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan tertentu merupakan retribusi atas kegiatan

tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang bertujuan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas suatu kegiatan, penggunaan sumber daya alam, fasilitas dan sarana/prasarana tertentu agar melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Treyek.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ialah hasil yang diperoleh pemerintah daerah yang terpisah dari pengelolaan APBD yang diperoleh atas Bagian Laba dari BUMD dan Hasil atas Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- d. Lain-Lain PAD yang Sah
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari : Hasil Penjualan Aset Daerah, Jasa Giro, Sumbangan dari Pihak Ketiga, Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Bunga.

2.2 Tingkat Inflasi

2.2.1 Pengertian Inflasi

Menurut Firdaus (2011:115) definisi “Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga atas barang dan jasa yang secara umum menaik terus menerus yang disebabkan oleh jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan barang-barang dan jasa yang tersedia”. Kenaikan harga umum atas barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus. Secara umum inflasi adalah kondisi perekonomian suatu negara, dan tingkat pertumbuhannya melebihi tingkat pertumbuhan yang disyaratkan. Ketika berbagai kelompok dalam perekonomian mencoba untuk memperoleh tambahan pendapatan relatif yang lebih besar dari pertumbuhan produktivitas, inflasi juga dapat terjadi. Apalagi jika ekspektasi terlalu menggembarakan, maka akan menyebabkan permintaan barang dan jasa tumbuh terlalu cepat dibandingkan dengan tambahan output yang mungkin dicapai perekonomian, atau mungkin karena berbagai faktor yang ada. Hal tersebut menyebabkan harganya akan naik secara tajam. Inflasi juga merupakan salah satu masalah ekonomi yang menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan ekonom. Seperti yang diketahui, salah satu tujuan utama perekonomian

adalah menjaga tingkat harga yang relatif stabil, yang artinya gejala ekonomi biasanya menunjukkan bahwa tingkat harga terus naik. Kondisi inflasi adalah harga-harga secara umum terus meningkat. Jika suatu harga komoditas naik atau harga komoditas naik karena faktor musim, maka hal itu tidak disebut inflasi.

Berdasarkan uraian di atas dinyatakan, Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang dan jasa secara umum yang terus menerus dalam waktu yang tidak dapat ditentukan dan berada pada tingkat yang tinggi. Dalam arti suatu kondisi perekonomian yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang terus menerus, yang menyebabkan perekonomian berkembang pesat dari keadaan yang diinginkan, yang berarti terjadi ketimpangan permintaan antara permintaan komoditas atau tingkat produksi yang minimum karena permintaan yang besar yang mengarah pada kenaikan harga.

2.2.2 Teori – Teori Inflasi

Ada beberapa macam teori inflasi yang didalamnya mencakup aspek dari proses inflasi, adapun ketiga aspek tersebut adalah :

A. Teori Kuantitas

1. Jumlah uang yang beredar

Inflasi hanya terjadi bila adanya peningkatan atas volume jumlah uang yang beredar. Peristiwa seperti ini misalnya, seperti gagal panen, hanya tersebut akan menaikkan harga untuk sementara. Jika jumlahnya tidak dinaikkan, inflasi otomatis akan berhenti terlepas dari alasan kenaikan harga awal.

2. Psikologi Masyarakat

Ada 3 kemungkinan situasi dimana masyarakat berasumsi mengenai harga suatu komoditas di masa mendatang. kondisi pertama adalah jika masyarakat tidak mengharapkan kenaikan harga dalam beberapa bulan ke depan. Kedua, masyarakat (berdasarkan pengalaman beberapa bulan sebelumnya) mulai menyadari keberadaan inflasi. ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah, tahap hiperinflasi, di mana orang kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang.

B. Teori Keynes

Menurut Sukirno (2017:9) menyatakan bahwa;

Inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Misalnya kelompok sosial, seperti aparat pemerintah, swasta, atau buruh kerja yang berusaha menaikkan gaji atau upah, kenaikan tersebut akan berdampak pada permintaan barang dan jasa yang akan menaikkan harga.

C. Teori Strukturalis

Teori ini sering disebut dengan teori inflasi jangka panjang karena penyebab terjadinya inflasi yang disebabkan oleh kekakuan struktur ekonomi, Karena produksi komoditas ini tumbuh terlalu lambat dibandingkan dari permintaan masyarakat, dan harga komoditas dan jasa meningkat. Teori inflasi yang sering digunakan dan terkenal adalah teori kuantitas. Dalam teori kuantitas, orang mengira bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Faktanya, jumlah uang beredar sangat mempengaruhi inflasi.

2.2.3 Hubungan Teori Tingkat Inflasi

2.2.3.1 Hubungan Teori Inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Boediono (2014:161) menyatakan bahwa “kuantitas jumlah uang yang beredar dapat menentukan tingkat inflasi, dimana semakin banyak uang yang beredar maka inflasi semakin tinggi”. Inflasi dianggap pemicu permasalahan dalam perekonomian karena menurunkan konsumtif masyarakat. Tetapi sebenarnya tidak ada yang berubah, dengan adanya inflasi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Ketika inflasi melambat maka perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk setiap tahun, yang mengakibatkan pendapatan pengusaha meningkat namun upah pegawai tetap sama. Dalam hal ini pemerintah harus mengatasi inflasi dengan melakukan beberapa kebijakan, salah satunya dengan kebijakan moneter yang dimana diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju keadaan normal, untuk menerapkan kebijakan ini Bank Indonesia perlu menjalankan beberapa kebijakan seperti kebijakan diskonto, kebijakan pasar

terbuka dan menaikkan cash ratio. Psikologi masyarakat/ekspektasi masyarakat dapat mempengaruhi tingkat harga. dimana jika harga naik dan jika ekspektasi masyarakat bersifat adaptif yaitu jika mereka membentuk ekspektasi atas dasar perilaku penetapan harga sebelumnya maka perusahaan mungkin akan terus menaikkan harga meskipun permintaan melambat.

Pada Teori Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena adanya gaya hidup yang berlebihan dari suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia. Karena keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan, permintaan atas barang dan jasa bertambah, sedangkan penawaran tetap, yang akan terjadi adalah harga akan cenderung naik, pemerintah dapat membeli barang dan jasa dengan cara mencetak uang, misalnya inflasi juga dapat terjadi karena keberhasilan pengusaha dalam memperoleh kredit. Kredit yang diperoleh ini digunakan untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan agregat meningkat, sedangkan penawaran agregat tetap. Kondisi ini berakibat pada kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum, namun pendapatan riil masyarakat akan berkurang diakibatkan daya konsumtif yang berlebih untuk memenuhi kebutuhan.

2.2.3.2 Hubungan Teori Inflasi dengan Investasi

Pandangan mengenai hubungan antara investasi dengan teori inflasi yaitu teori inflasi mempengaruhi investasi secara signifikan di Indonesia. Dimana pada teori kuantitas yang menjelaskan keadaan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan inflas meningkat. Apabila inflasi mengalami peningkatan maka investasi di Indonesia akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi yang meningkat menandakan adanya ketidakstabilan harga. Ketidakstabilan (*return if investment*), karena suku bunga adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam berinvestasi. Sebaliknya, apabila inflasi mengalami penurunan mengindikasikan bahwa harga-harga dapat dikendalikan dengan baik atau terciptanya kestabilan harga. Kondisi ini akan berdampak terhadap penurunan suku bunga sehingga akan meningkatkan pengembalian investasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam teori Klasik bahwa ada hubungan terbalik antara suku bunga dalam negeri dan besarnya penerimaan investasi oleh suatu

negara (Sukirno, 2016). Dengan demikian bila inflasi suatu negara meningkat maka akan diikuti oleh kenaikan suku bunganya yang selanjutnya akan mendorong turunnya jumlah investasi yang diterima oleh negara tersebut. Sesuai dengan teori Fisher bila inflasi suatu negara meningkat maka akan diikuti oleh kenaikan suku bunga dalam negeri. Di lain pihak kondisi suku bunga suatu negara sangat berpengaruh terhadap keputusan para investor untuk menanamkan modalnya. Berarti pengaruh inflasi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing di suatu negara terjadi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada bunga domestik.

2.3 Laju Pertumbuhan Investasi

Mankiw (2014:94) menjelaskan “Pada hakikatnya investasi merupakan awal dari kegiatan pembangunan ekonomi.” Investasi dapat dilakukan oleh sektor swasta, pemerintah, atau melalui kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Menurut Noor (2009:4) “investasi merupakan kegiatan menanamkan modal yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik investor perorangan, perusahaan ataupun pemerintah dalam sebuah negara, bisa berupa uang atau sumber daya lainnya dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan atau manfaat di masa yang akan datang”.

Menurut penelitian Todaro (2011:137) “kegiatan investasi dapat memampukan masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Investasi dapat bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) .

Menurut UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa;

Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan guna untuk membiayai kegiatan perusahaan di Indonesia. PMDN merupakan modal dari kekayaan masyarakat di Indonesia terdiri dari pihak perorangan atau badan yang didirikan di Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa investasi adalah komitmen terhadap penempatan jumlah dana atau sumber daya lain seperti pembelian tanah untuk mendirikan bangunan industri, pembelian peralatan produksi dan penyediaan barang modal/mentah yang ditanamkan pada saat ini, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang lebih besar di masa depan sebagai kompensasi atas penundaan penggunaan dana yang diinvestasikan dan risiko kerugian yang dapat menyebabkan ketidakpastian pembayaran/pengembalian di masa mendatang. PSAP 06 Paragraf 4 menjelaskan definisi dari Investasi adalah “Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25/2007 tentang Penanaman Modal, dalam hal penanaman modal pemerintah bertujuan untuk:

- a) Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
- b) Ciptakan pekerjaan
- c) Mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- d) Meningkatkan daya saing dunia usaha negara
- e) Meningkatkan kemampuan teknis nasional
- f) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam struktur pendapatan daerah, sebagian PAD bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. Ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan untuk mendanai pelayanan publik, dan masyarakat bisa langsung merasakan hasilnya, maka pengelolaan aset daerah tersendiri menjadi sangat penting. Namun pada kenyataannya, hasil yang diperoleh dari aset yang dipisahkan tersebut sangat kecil, sehingga investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkesinambungan hanya seperti dana yang terbuang, merugikan APBD dan tidak memberikan andil terhadap meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal BUMD merupakan bagian dari investasi daerah jangka panjang, dan jumlah kumulatifnya ditampilkan pada neraca sisi aset. Dalam

anggarannya, satu atau lebih investasi tidak diakui sebagai belanja, tetapi dimasukkan dalam pengeluaran pembiayaan. Disisi lain, hasil investasi diklasifikasikan sebagai PAD. Oleh karena itu, kebijakan umum APBD akan mencakup penjelasan mengenai pendapatan dan pembiayaan ini.

Menurut Raharjo dan Manurung (2008:49) dalam teori ekonomi makro, “investasi secara fisik adalah dalam bentuk barang dan modal (pabrik dan peralatan), bangunan dan persediaan barang (*inventory*) dengan pembatasan tersebut, definisi investasi dapat lebih dijelas sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (*capital stock*)”. Untuk mempermudah perhitungan, umumnya stok barang modal dinilai dengan uang, yaitu jumlah barang modal dikalikan harga perolehan per unit barang modal. Dengan demikian barang modal merupakan konsep *stock* (*stock concept*), karena besarnya dihitung pada satu periode tertentu.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak terlepas sebagai landasan dan referensi dalam menyusun kerangka pikir ataupun arahan dari penelitian ini. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel 2.1

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eni Aryanti & Iin Indrianti (2012)	Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang	Variabel : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1) ▪ Jumlah Penduduk (X3) ▪ Inflasi (X3) ▪ Pendapatan Asli Daerah (Y) 	Variabel Inflasi secara statistik tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD, dikarenakan Inflasi menimbulkan beberapa efek yang dapat mengurangi pendapatan rill.
2.	Muchtolifah (2010)	Pengaruh PDRB, Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto	Variabel : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1) ▪ Jumlah Penduduk (X2) ▪ Inflasi (X3) ▪ Investasi Industri (X4) ▪ Jumlah Tenaga Kerja (X5) ▪ Pendapatan Asli 	Secara simultan dijelaskan dalam penelitian ini bahwa Inflasi dan Investasi Industri berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap Pendapatan Asli

			Daerah (Y)	Daerah (PAD) di Kota Mojokerto.
3.	Karlina Batik (2013)	Analisis Pengaruh Investasi,PDRB,Jumlah Penduduk,Penerimaan Pembangunan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat	Variabel : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaruh Investasi (X1) ▪ PDRB (X2) ▪ Jumlah Penduduk (X3) ▪ Penerimaan Pembangunan (X4) ▪ Inflasi (X5) ▪ Pendapatan Asli Daerah (Y) 	Secara statistik dijelaskan bahwa Variabel Investasi dan Inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial variabel Investasi dan Inflasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.	Pande & Agung (2014)	Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali.	Variabel : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendapatan per-kapita (X1) ▪ Tingkat Inflasi (X2) ▪ Investasi (X3) ▪ Otonomi Daerah (X4) ▪ Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) 	Secara simultan Tingkat Inflasi dan Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali. Secara parsial dijelaskan bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD di Provinsi Bali. Secara parsial Invetasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penerimaan PAD di Provinsi Bali.
5.	Indra Randy Waley, Anderson G.Kumena	Analisis Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inflasi (X1) ▪ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) 	Variabel Inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan

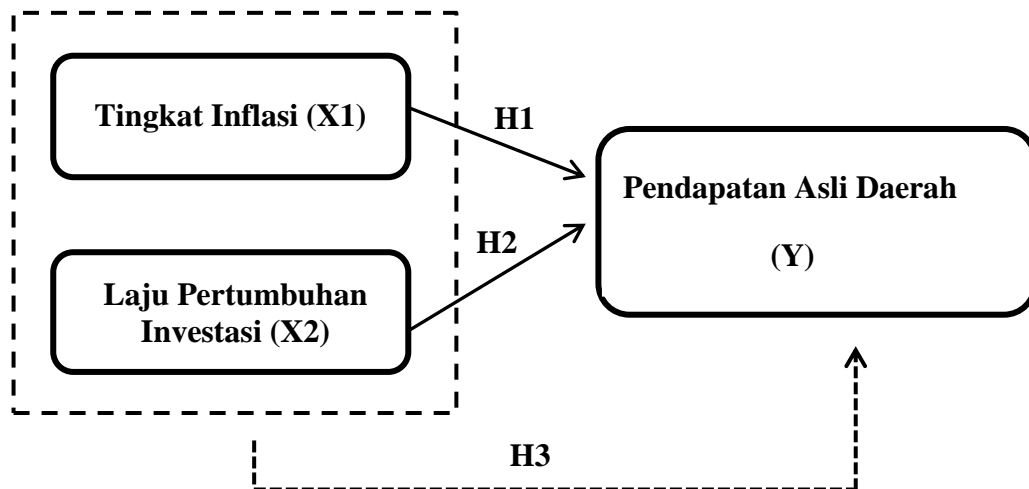
	ung, Jacline I. Sumual (2017)	Asli Daerah di Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Y) 	jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado.
6.	Sari (2013)	Analisis Variabel- Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali	<p>Variabel :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (X1) ▪ Tingkat Investasi (X2) ▪ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X3) ▪ Pendapatan Asli Daerah (Y) 	Variabel Tingkat Investasi pada penelitian ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Bali Periode 1991- 2009.
7.	Ayu Mita Utami (2013)	Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tasikmalaya)	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investasi (X1) ▪ Pertumbuhan Ekonomi (X2) ▪ Pendapatan Asli Daerah (Y) 	Secara Parsial dijelaskan bahwa Variabel Investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Secara Simultan, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama memiliki

				pengaruh terhadap peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah.
8.	Enni Sari Siregar (2016)	Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Investasi Daerah Sumatera Selatan	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Inflasi (X) ▪ Investasi Daerah (Y) 	Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Investasi Daerah Sumatera Selatan.
9.	Umdatul Husna (2015)	Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Se-Jawa Tengah	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PDRB (X1) ▪ Inflasi (X2) ▪ Pengeluaran Pemerintah (X3) ▪ Pendapatan Asli Daerah (Y) 	Variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Penelitian terdahulu, Tahun 2010 s.d 2017

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran yang baik secara teoritis akan menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2017:60) “kerangka pemikiran adalah model konseptual dari hubungan antara teori dan berbagai faktor, dan faktor-faktor tersebut diartikan sebagai isu penting”. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan :

- > : Pengaruh Parsial
 - - - - -> : Pengaruh Simultan

2.6 Hipotesis

Sugiyono (2017: 63) mengemukakan bahwa:

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas pernyataan-pertanyaan penelitian, dimana pernyataan pertanyaan tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat yang ringkas dan jelas. Dijelaskan untuk jawaban sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan, bukan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data atau survei kuesioner.

2.6.1 Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Banyaknya teori yang menjelaskan hubungan dan pengaruh antara Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sela (2017) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan fenomena dari berbagai negara yang mengalami inflasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan inflasi, antara lain tingginya permintaan, kenaikan biaya produksi yang membuat para pemilik usaha harus menaikkan harga jual dari produk, kenaikan kurs, hutang negara,

peningkatan kebutuhan akibat masyarakat yang sangat konsumtif, dan jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Meningkatnya laju inflasi menyebabkan daya beli masyarakat berkurang dan memfokuskan pada sumber daya riil yang ada. Pemerintah juga akan menetapkan kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan tarif pajak untuk mendorong penerimaan lebih besar dan mengurangi pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.6.2 Pengaruh Laju Pertumbuhan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut PP No.71/2010, Investasi atau yang juga sering disebut penanaman modal atau penyertaan modal dalam bentuk sejumlah dana atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk membeli barang modal dan peralatan produksi yang dinilai mampu memberikan penambahan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah juga dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi pengeluaran pemerintah dengan mempermudah kemudahan berinvestasi, cara ini akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi disuatu daerah, karena jika investasi dalam suatu daerah bertambah maka pendapatan suatu daerah juga akan meningkat sehingga hal ini memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat karena terjadinya peningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Disini pentingnya peran investasi terhadap pendapatan disuatu daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H2 : Laju Pertumbuhan Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.6.3 Pengaruh Tingkat Inflasi dan Laju Pertumbuhan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format alternatif sebagai berikut:

H3 : Tingkat Inflasi dan Laju Petumbuhan Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah